

LKPJ

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN



DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2022

3.3.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sakip PD	POIN	80.39	79.77	36,581,438,745	35,135,192,184			
					Survey Kepuasan Pelayanan Internal	Persen	85	71.88					
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	Dokumen	14	14	239,494,065	223,729,460			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	Dokumen	9	9	113,115,133	105,683,186			
				2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dok Evaluasi kinerja PD (LAKIP, LPPD, LKPJ ATA dan Dokumen/Buku Statistik)	Dokumen	5	5	126,378,932	118,046,274			
				2 Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Survey kepuasan pelayanan keuangan	Persen	80	74.06	28,103,976,680	27,165,375,536			
				3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	Orang	192	192	28,069,476,902	27,130,876,036			
				4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Dokumen	14	14	29,049,951	29,049,673			
				5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	1	5,449,827	5,449,827			
				3 Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Survey kepuasan pelayanan kepegawaian	Persen	80	73.68	48,694,000	38,280,000			
				6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	Orang	10	5	30,000,000	20,600,000	Minimnya undangan diklat berkontribusi/berbayar kepada OPD	Melakukan himbauan kepada seluruh Pegawai dilingkup OPD untuk aktif mencari informasi secara mandiri terkait pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi	
				7 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	80	80	18,694,000	17,680,000			
				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey kepuasan pelayanan umum	Persen	80	69.14	1,322,915,910	1,232,031,533			
				8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Jenis	26	26	79,962,509	68,561,658			
				9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor & perlengkapan kantor	Jenis	51	51	191,160,637	173,209,650			
				10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	Jenis	84	84	108,380,518	104,682,596			
				11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak	Lembar	56,884	56,884	58,481,667	53,144,502			
				12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	Eksemplar	140	140	10,000,000	9,980,000			
				13 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang dibeli	Jenis	40	40	130,914,829	103,479,436			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				14 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum rapat	Pax	1,015	1,015	71,975,000	68,478,000			
				15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kali	279	279	672,040,750	650,495,691			
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey kepuasan penyediaan jasa penunjang	Persen	80	70.63	5,756,728,590	5,619,702,286			
				16 Penyediaan Jasa Surat Menvurat	Jumlah Materai	Lembar	1130	950	15,985,000	13,105,000			
				17 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, telp/fax, air, internet, virtual meeting yang dibavarkan	Bulan	12	12	422,143,590	369,197,286			
				18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga PHL	Orang	139	139	5,318,600,000	5,237,400,000			
				6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Survey kepuasan pelayanan umum	Persen	80	69.14	1,109,629,500	856,073,369			
				19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil operasional yang dipelihara	Unit	39	25	708,669,500	465,140,500	Terdapat kendaraan yang tidak dapat dipelihara karena belum dilakukan pelimpahan aset APBN ke APBD. Hilangnya surat kelengkapan STNK/BPKB beberapa kendaraan sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran pajak.	Melakukan Koordinasi ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pihak-pihak terkait dalam rangka penyelesaian masalah.	
				20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Unit	106	106	106,960,000	98,522,013			
				21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Gedung	1	1	294,000,000	292,410,856			
				2 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)	Persen	18	15	92,466,298	80,364,800	Menurunnya luas tanam padi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan faktor cuaca ekstrim dan alih fungsi lahan pertanian.	Menerapkan kebijakan terkait optimalisasi lahan sawah untuk meningkatkan produktifitas.Serta melibatkan penyuluh pertanian provinsi untuk melakukan pendampingan ke petani	
				7 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	Produk	1	1	92,466,298	80,364,800			
				22 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Unit	1	1	68,904,753	65,868,300			
				23 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Dokumen	1	1	23,561,545	14,496,500			
				3 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi a) Kelompok Pangan Umbi-umbian; b) Kelompok Pangan Kacang-Kacangan; c) Kelompok Pangan Buah dan Sayur	Skor	a)2; b) 4; c) 21,8.	a)1,4; b) 3; c) 20,4.	450,088,523	378,048,954	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi ideal masyarakat yang dianjurkan.	Menggiatkan upaya-upaya dalam meningkatkan Skor PPH konsumsi pangan lokal khususnya kacang-kacangan, sayur dan buah melalui advokasi, kampanye, sosialisasi, dan promosi.	
				8 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi	Coefisien varian harga pangan (a. pokok/beras; b. hortikultura/cabe merah; c.hewani/avam)	Persen	a. 5; b. 25; c. 10	a. 5; b. 25; c. 10	224,759,381	176,835,200			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						24	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dokumen	1	1	25,108,308	22,488,500			
						25	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Gapoktan yang difasilitasi	Gapoktan	4	4	75,996,616	73,140,900			
						26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen stok dan pasokan	Dokumen	2	2	123,654,457	81,205,800			
						9	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Persen	100	100	148,202,288	124,386,900			
						27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Dokumen	2	2	19,102,288	15,796,900			
						28	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton	10	10	129,100,000	108,590,000			
						10	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai	Jumlah pelaksanaan gerakan promosi Pola Pangan B2SA	Paket	1	1	77,126,854	76,826,854			
						29	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah event	Event	1	1	60,211,498	59,911,498			
						30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen Konsumsi perkapita pertahun	Dokumen	1	1	16,915,356	16,915,356			
						4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah menurunnya daerah rentan rawan pangan	Persen	15	52.63	56,891,689	56,099,400			
						11	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	3	56,891,689	56,099,400			
						31	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Peta FSVA, Dokumen SKPG dan Akses Pangan	Dokumen	3	3	56,891,689	56,099,400			
						5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	Persen	90	91.06	180,591,497	171,817,400			
						12	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Jumlah Produk PSAT yang terawasi	Persen	100	100	180,591,497	171,817,400			
						32	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat prima	Sertifikat	11	27	84,440,327	83,944,200			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan		Uraian Program/Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
1	2	3	4		5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
							33	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat register PSAT	Sertifikat	3	3	28,278,669	21,086,500		
							34	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk PSAT yang terawasi	Produk	18	26	67,872,501	66,786,700		
TOTAL JUMLAH												37,361,476,752	35,821,522,738			

KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



EDIRONDHONI, S.P., M.M.
PEMBINA TK.I / IV.b
NIP. 19701116 199303 1 005

3.3.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi	Persen	100	100	17,356,098,106	6,080,411,550	Berkurangnya minat para petani atau peternak untuk memelihara ternak, dikarenakan lahan dimiliki semakin menyempit akibat alih fungsi lahan ternak, sehingga sulit mencari padang penggembalaan atau bahan pakan untuk ternak yang dipeliharanya. Serta pengaruh kondisi cuaca ekstrim.	Melaksanakan kegiatan pegadaan bantuan hewan ternak (8 ekor Sapi PO jantan) pada APBD murni TA 2022 sebagai tindak lanjut dari pengadaan bantuan ternak 80 ekor sapi PO betina di tahun 2021, serta Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis kepada peternak.	
					Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan & Hortikultura	Persen	83.32	85.7					
					Persentase peningkatan luas tanam perkebunan	Persen	11.96	11.1					
					Persentase benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat	Persen	5	5.6					
					Persentase Ketersediaan benih/bibit pertanian tingkat lapang (daerah)	Persen	50	57.78					
					Persentase Pertambahan Angka Kelahiran Ternak	Persen	43.41	38.37					
				1 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen pengawasan dan peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi	Dokumen	1	1	3,371,405,158	3,115,027,154			
				1 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah laporan/dokumen pengawasan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian	Laporan	1	2	3,371,405,158	3,115,027,154			
				2 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Luasan Benih/Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tersedia (Ha)	Hektar	10	65	2,116,799,748	2,107,396,081			
					Jumlah sertifikasi benih/bibit pertanian yang dikeluarkan	Bibit	300,000	561052					
				2 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	1	1	2,054,627,214	2,046,525,697			
				3 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	47	57	10,183,100	9,796,300			
				4 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Dokumen	1	1	19,889,769	19,564,769			
				5 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Dokumen	1	1	19,226,924	18,936,924			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD		
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14		
						6	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Laporan	1	1	12,872,741	12,572,391				
						3	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bantuan bibit ternak	Ekor	550	8	11,298,283,985	288,481,291	Penambahan anggaran DID tahap 2 sebesar Rp 11.005.000.000,- untuk Pengadaan hewan ternak sapi sebanyak 550 ekor tidak dapat terealisasi dikarenakan waktu lelang/pengadaan tidak memadai (DDPA baru terbit bulan Desember 2022), serta sulitnya mendapatkan pemasok dan ketersediaan sapi yang sesuai dengan spesifikasi kegiatan berdasarkan jumlah dan waktu yang ditentukan. Selain itu, kondisi cuaca ekstrim di Pulau Bangka berpengaruh menghambat proses distribusi hewan ternak sapi dari luar daerah.	Melakukan Koordinasi ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pelimpahan Kegiatan DID yang tidak terlaksana ditahun 2022 (Pengadaan Ternak Sapi) untuk dilaksanakan di tahun 2023 melalui APBD Mendahului Perubahan Tahun Anggaran 2023.		
						7	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	550	8	11,298,283,985	288,481,291				
						4	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	Kualitas Mutu pakan ternak (%)	Persen	100	100	569,609,215	569,507,024				
						8	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	569,609,215	569,507,024				
						2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Rasio Ketersediaan Prasarana Pra Panen Pertanian		Persen	15	15	886,158,833	882,733,450			
								Rasio Ketersediaan Prasarana Pasca Panen Pertanian		Persen	5	5					
						5	Penataan Prasarana Pertanian	Rasio ketersediaan prasarana pertanian pra panen		Persen	15	15	886,158,833	882,733,450			
								Rasio ketersediaan prasarana pertanian pasca panen		Persen	5	5					
							9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	6	6	886,158,833	882,733,450			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				3 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	Persen	100	78.68	219,741,450	204,124,062	Terdapat penambahan kasus baru yaitu masuknya Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebanyak 4.116 kejadian pada hewan ternak sapi dan kambing di tahun 2022, yang sebelumnya tidak diperkirakan dalam perhitungan target indikator.	1. Membentuk Gugus Tugas penanganan PMK; 2. Melakukan vaksinasi ternak; 3. Pengendalian lalu lintas hewan; 4. Pelatihan tematik dan penyuluhan ke peternak terkait penanganan PMK; 5. Rapat koordinasi teknis pertanian bersama kepala OPD Kabupaten/Kota	
				6 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah	Terkendalinya keamanan 7 Kab/kota di wilayah Babel terhadap penyakit-penyakit zoonosis	Laporan	7	7	125,713,651	124,631,106			
				10 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pelaksanaan pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Zoonosis	2	2	125,713,651	124,631,106			
				7 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikat Zona/kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Tersertifikasinya unit usaha produk peternakan di Bangka Belitung (ber NKV/Nomor Kontrol Veteriner)	Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	1	1	94,027,799	79,492,956			
					Terujinya sample produk peternakan pada unit-unit usaha/kios-kios produk peternakan	Sample	210	210					
				11 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	1	1	94,027,799	79,492,956			
				4 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Dokumen	1	1	250,926,032	148,741,541			
					Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Dokumen	1	1					
				8 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Dokumen pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Dokumen	4	4	250,926,032	148,741,541			
				12 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Polis Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Ha	3500	12	46,296,678	45,528,202	Pagu sub kegiatan tidak dapat memfasilitasi target Renstra yang tercantum di DPA	Melakukan Koordinasi ke BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait perubahan Indikator pada Sub Kegiatan agar menyesuaikan dengan kemampuan anggaran	
				13 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Polis Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	Ekor	2010	584	34,755,432	32,407,339	Pagu sub kegiatan tidak dapat memfasilitasi target Renstra yang tercantum di DPA	Melakukan Koordinasi ke BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait perubahan Indikator pada Sub Kegiatan agar menyesuaikan dengan kemampuan anggaran	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
					14	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rasio luas areal pengendalian OPT terhadap luas pertanaman	Persen	3	4.2	169,873,922	70,806,000	1). Untuk Belanja Jasa audit Surveillance ISO anggaran tidak cukup untuk melakukan Akreditasi sehingga tidak memungkinkan untuk terealisasi 2). Untuk Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan kelayakan bangunan gedung tidak terealisasi dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pengadaan di ULP. (DPPA baru terbit per 18 november 2022)	Melakukan Koordinasi ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait Belanja Jasa Audit Surveillance ISO untuk dilaksanakan di Tahun 2023, serta berkoordinasi ke Unit Lembaga Pengadaan (ULP) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur.	
					5 Program Perizinan Usaha Pertanian			Dokumen Perizinan Usaha Pertanian	Dokumen	1	1	39,999,723	37,838,598		
					9	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam usaha pertanian	Terlaksananya penerbitan izin usaha pertanian	Dokumen	1	1	39,999,723	37,838,598			
					15	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	1	1	39,999,723	37,838,598			
					6 Program Penyuluh Pertanian			Persentase peningkatan kelas kelompok tani	Persen	80	80	700,017,145	680,524,416		
					10	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang dilatih	Orang	204	204	133,256,527	132,786,091			
					16	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh yang dilatih	Orang	204	204	133,256,527	132,786,091			
					11	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian yang dibina	BPP	32	32	566,760,618	547,738,325			
					17	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian yang menerima informasi teknis dan inovasi pertanian	BPP	32	32	490,596,228	472,170,935			
					18	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah pembinaan penyuluhan pertanian	BPP	32	32	76,164,390	75,567,390			
TOTAL JUMLAH											19,452,941,289	8,034,373,617			

KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



EDL ROMDHONI, S.P., M.M.
PEMBINA TK.I / IV.b
NIP. 19701116 199303 1 005

Tabel 4.1 Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Pusat Tahun 2022

Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan		Anggaran	Relisasi Keuangan	
		(Rp)	(Rp)	(%)
		Rp17,994,735,000.00	Rp17,120,467,693.00	95.14%
1). 309901 Ditjen Hortikultura		Rp1,896,560,000.00	Rp1,876,269,500.00	98.93%
018.04.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp856,560,000.00	Rp846,203,500.00	98.79%
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Rp856,560,000.00	Rp846,203,500.00	98.79%
018.04.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp940,000,000.00	Rp930,146,000.00	98.95%
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Rp760,000,000.00	Rp752,327,300.00	98.99%
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Rp180,000,000.00	Rp177,818,700.00	98.79%
018.04.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp100,000,000.00	Rp99,920,000.00	99.92%
1774	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Rp100,000,000.00	Rp99,920,000.00	99.92%
2). 309164 Ditjen Tanaman Pangan		Rp3,029,325,000.00	Rp2,978,048,848.00	98.31%
018.03.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp933,457,000.00	Rp915,280,600.00	98.05%
5885	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Rp933,457,000.00	Rp915,280,600.00	98.05%
018.03.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp1,681,210,000.00	Rp1,655,840,476.00	98.49%
1762	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealida Tanaman Pangan	Rp1,345,000,000.00	Rp1,323,047,876.00	98.37%
4579	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Rp336,210,000.00	Rp332,792,600.00	98.98%
018.03.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp414,658,000.00	Rp406,927,772.00	98.14%
1766	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Rp414,658,000.00	Rp406,927,772.00	98.14%
3). 309165 Ditjen Perkebunan		Rp3,612,724,000.00	Rp3,567,645,159.00	98.75%
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp3,140,544,000.00	Rp3,111,128,159.00	99.06%
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	Rp263,350,000.00	Rp263,250,000.00	99.96%
5888	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	Rp1,992,515,000.00	Rp1,985,012,779.00	99.62%
5889	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Rp775,740,000.00	Rp755,166,380.00	97.35%
5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Rp108,939,000.00	Rp107,699,000.00	98.86%
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp472,180,000.00	Rp456,517,000.00	96.68%
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Rp472,180,000.00	Rp456,517,000.00	96.68%
4). 309166 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan		Rp6,023,287,000.00	Rp5,266,025,000.00	87.43%
018.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp65,000,000.00	Rp64,943,000.00	99.91%
5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Rp65,000,000.00	Rp64,943,000.00	99.91%
018.06.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp5,489,149,000.00	Rp4,739,043,000.00	86.33%
1783	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Rp480,000,000.00	Rp479,429,000.00	99.88%
1784	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Rp3,624,439,000.00	Rp2,980,628,000.00	82.24%
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Rp1,156,810,000.00	Rp1,055,105,000.00	91.21%
1786	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp227,900,000.00	Rp223,881,000.00	98.24%
018.06.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp469,138,000.00	Rp462,039,000.00	98.49%
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Rp469,138,000.00	Rp462,039,000.00	98.49%
5). 309168 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		Rp3,432,839,000.00	Rp3,432,479,186.00	99.99%
018.08.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp2,861,969,000.00	Rp2,861,713,950.00	99.99%
1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Rp1,704,000,000.00	Rp1,703,960,000.00	100.00%
1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Rp160,000,000.00	Rp159,875,000.00	99.92%
3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Rp986,755,000.00	Rp986,665,000.00	99.99%
3994	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	Rp11,214,000.00	Rp11,213,950.00	100.00%
018.08.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp570,870,000.00	Rp570,765,236.00	99.98%
1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Rp570,870,000.00	Rp570,765,236.00	99.98%

KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



EDY R. MDHONI, S.P., M.M.
PEMBINA TK.I / IV.b
NIP. 19701116 199303 1 005

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Dalam pelaksanaan kegiatan dana Tugas Pembantuan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya tidak luput dari berbagai permasalahan yang menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan dilapangan, namun hal tersebut dapat diantisipasi dengan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan untuk menginventarisir kendala dan risiko yang terjadi sehingga dapat segera dicarikan solusi untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Pengawasan dari pimpinan senantiasa dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan agar permasalahan yang terjadi tidak mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja yang telah ditentukan. Berikut diuraikan hambatan/permasalahan yang teridentifikasi serta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2022 :

No.	Hambatan/Permasalahan	Tindak lanjut/Solusi
1	Seringnya terjadi revisi/refocusing anggaran dari kementerian sehingga membutuhkan penyusunan kembali strategi dan rencana pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia.	Memperkuat sistem manajemen dengan menerapkan skala prioritas dalam menentukan strategi dan pengambilan keputusan guna pengendalian internal yang terarah dan tepat sasaran.
2	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung program pemerintah serta kurangnya pengetahuan terkait manfaat pelaksanaan kegiatan.	Menggiatkan upaya-upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat melalui advokasi, kampanye, sosialisasi, dan promosi.
3	Ketersediaan informasi/data statistik terkait kondisi dan realisasi kegiatan dilapangan yang tidak akurat dikarenakan lemahnya <i>updating</i> data dari petugas tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan	Menjalin koordinasi, melakukan pembinaan dan pengawasan berkala, serta memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital untuk mempermudah petugas di Kabupaten untuk melakukan <i>enty</i> data.

4	Faktor alam, cuaca buruk, dan kondisi geografis daerah kepulauan yang menyebabkan seringnya terjadi keterlambatan dalam proses distribusi, penyediaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pertanian yang telah dianggarkan dalam pelaksanaan kegiatan dana Tugas Pembantuan.	Mengantisipasi keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan dengan menyusun jadwal palang berdasarkan kondisi prakiraan cuaca, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan data-data yang akurat agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
---	--	---

KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



EDKROMDHONI, S.P., M.M.
NIP. 19701116 199303 1 005